

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 DEFINISI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Arti penting pengendalian intern bagi manajemen dan akuntan publik telah diakui oleh selama bertahun-tahun. Faktor-faktor yang mendorong atas semakin luasnya pengakuan tentang pentingnya pengendalian intern adalah :

- a. Besarnya ruang lingkup perusahaan sehingga tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung.
- b. Pengecekan dan review untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
- c. Sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien sangat bermanfaat dan membatasi ruang lingkup audit (ditinjau dari segi auditing).

Jadi pengertian dari *pengendalian intern* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil suatu satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- c. Efektifitas dan efisien operasi

2.2 TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2.2.1 Menjaga Kekayaan Perusahaan

- a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yaitu, pembatasan akses langsung terhadap kekayaan dan pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan.
- b. Pertanggung jawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Yaitu, perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada dan rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan.

2.2.2 Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

- a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yaitu, pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yaitu, pencatatan semua transaksi yang terjadi dan benar-benar terjadi, transaksi yang dicatat harus dengan jumlah yang benar, transaksi dicatat dengan periode akuntansi yang seharusnya dan transaksi dicatat dengan teliti.

2.3 UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah :

2.3.1 Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk departemen yang kemudian dibagi menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini :

1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2.3.2 Sistem Wewenang Dan Prosedur Pencatatan Yang Memberikan Perlindungan Yang Cukup Terhadap Kekayaan, Hutang, Pendapatan, Dan Biaya

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi perusahaan harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya.

2.3.3 Praktik Yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Setiap Unit Organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Adapun cara yang ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika

dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah diterapkan perusahaan.

2.3.4 Karyawan Yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit usur dan sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Meskipun tiga unsur pengendalian yang lain cukup kuat, namun jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, empat tujuan sistem pengendalian intern tidak akan tercapai.

Namun, karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya tidak cukup menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian intern. Manusia mempunyai kelemahan yang bersifat manusiawi, seperti misalnya bosan, tidak puas, memiliki masalah pribadi yang mengganggu pelaksanaan tugasnya, atau tujuan pribadinya berubah sehingga bertentangan dengan tujuan perusahaan. Dalam mengembangkan sistem, analis sistem memandang manusia yang jujur tidak akan selamanya jujur. Banyak godaan yang selalu datang kepada setiap orang.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut dapat ditempuh :

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Sedangkan menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway (COSO)* unsur-unsur yang saling berhubungan dalam sistem penendalian intern ada lima, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya dan merupakan suatu landasan bagi unsur penendalian lainnya dengan menciptakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian dalam sebuah perusahaan terdiri dari berbagai faktor, diantaranya :

- a. Integritas dan nilai-nilai etika dengan memberi contoh yaitu menunjukkan integritas dan berperilaku dengan standart etika yang tinggi. Mengkomunikasikan kepada semua karyawan perusahaan

tentang aturan-aturan tertulis, jika ada pelanggaran yang dilakukan karyawan maka harus dipertanggung jawabkan bisa dengan memberi hukuman. Memberi pedoman moral kepada karyawan agar bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

- b. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
- c. Dewan komisaris dan komite audit harus melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap pengendalian intern. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris dan komite audit meliputi independensi dari manajemen yang berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar, penalaman, serta tinginya kedudukan , seberapa jauh keterlibatan dan ketajaman atas aktivitas manajemen, ketepatan tindakan yang diambil, serta luasnya interaksi dengan auditor intern maupun auditor ekstern.
- d. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuannya karena struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemantauan aktivitas perusahaan.

2. Perhitungan Risiko

Perhitungan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, analisa, dan pengolahan risiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi.

3. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi.

5. Pemonitoran

Pemonitoran adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi oleh pengendalian dengan orang yang tepat untuk periode waktu tertentu, untuk menentukan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

2.4 LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektifitas unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Contoh, Suatu perusahaan yang manajemen puncaknya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan, bukan sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan, lingkungan ini akan mengakibatkan manajemen menengah dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan anggaran perusahaan.

Lingkungan pengendalian harus diberikan tekanan perhatian, karena berdasarkan kenyataan, pengendalian mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keseriusan pengendalian intern yang diterapkan didalam perusahaan.

Lingkungan pengendalian mempunyai tiga unsur yaitu :

2.4.1 Filosofi dan gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Contoh filosofi manajemen yang menekankan perencanaan sebagai dasar untuk melaksanakan bisnis adalah: “Kami berkeyakinan bahwa perencanaan merupakan seni untuk menyiapkan perubahan, oleh karena itu kami akan menggunakan perencanaan sebagai alat manajemen untuk membuat kami siap dalam menghadapi perubahan yang harus terjadi.” Manajemen yang memiliki filosofi ini akan menjadikan tindakan atas dasar rencana yang disusun terlebih dahulu secara matang, sehingga tidak ada kejadian yang terlaksana tanpa rencana.

2.4.2 Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan akuntan publik dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan akuntan publik dilakukan oleh manajemen pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh akuntan publik, padahal manajemen puncak yang menentukan pemilihan akuntan publik yang ditugasi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, untuk menciptakan independensi akuntan publik perusahaan yang *go-public* sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukan akuntan publik dari tangan manajemen puncak ketangan dewan komisaris atau komite pemeriksaan.

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengolahan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Dewan ini berfungsi mengawasi pengolahan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen atau direksi. Dengan demikian dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak ditangan manajemen. Dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan besar sekarang membentuk komite pemeriksaan (*audit komite*) yang anggotanya terdiri dari pihak luar perusahaan.

Pembentukan komite pemeriksaan ini ditujukan untuk memperkuat independensi akuntan publik yang dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggung jawaban keuangan yang akan dilakukan oleh manajemen.

Fungsi komite pemeriksaan secara langsung berdampak terhadap akuntan publik adalah :

- a. Menunjuk akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan.
- b. Membicarakan luas pemeriksaan dengan akuntan publik.
- c. Meminta komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah-masalah.
- d. Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan pada saat pemeriksaan akuntan selesai dilakukan.

Setelah itu akuntan publik harus mengkomunikasikan hasil pemeriksaanya kepada komite pemeriksaan atau kepada dewan komisaris sehingga akan menciptakan pengendalian yang baik dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

2.4.3 Kesadaran Pengendalian

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditujukan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal atau akuntan publik. Jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian yang dikemukakan oleh akuntan, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.

2.5 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN HUTANG

Sistem penendalian intern bukan merupakan tanggung jawab dari direktur keuangan saja, sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan, tanpa dukungan dari anggota direksi lain. Sistem pengendalian intern seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas intern dalam perusahaan yang berfungsi melakukan pengecekan sistem pengendalian intern harus bekerja dengan semestinya.

Dalam sistem pengendalian intern pembayaran hutang yang harus diperhatikan adalah :

1. Organisasi

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuannya, karena struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemantauan aktivitas perusahaan. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu perusahaan menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan. Hal ini sangat bergantung pada besarnya perusahaan dan sifat kegiatannya. Struktur organisasi perusahaan biasanya dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang secara tepat menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan.

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pembayaran Hutang Rekanan

Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu dengan otorisasi dari pihak yang berwenang, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Prosedur pembayaran hutang rekanan pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya meliputi kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen tersebut akan diberikan kepada pihak verifikasi yang bertugas memeriksa dan menghitung kembali jumlah hutang perusahaan yang akan dibayarkan kepada pihak rekanan. Sebelum pihak kas melakukan transaksi pembayaran hutang rekanan, dokumen-dokumen tersebut telah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang.

3. Praktik Yang Sehat

Efektif atau tidaknya struktur pengendalian intern akan sangat bergantung kepada kebijakan dan praktik yang sehat tentang sumberdaya manusia yang akan menentukan apakah perusahaan memiliki integritas yang diharapkan, nilai-nilai etika dan kompetensi. Praktik yang sehat pada perusahaan meliputi pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur yang telah ditetapkan. Cara perusahaan melakukan praktik yang sehat, yaitu pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu divisi tanpa ada campur tangan dari divisi lain. Karena setiap transaksi harus dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain sehingga terjadi pemisahan tugas yang akan membantu terlaksananya praktik yang sehat.

4. Karyawan Yang Kompeten

Dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu karyawan adalah unsur yang paling penting dalam sistem pengendalian intern karena dengan karyawan yang kompeten dan jujur perusahaan akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang kompeten, jujur dan ahli dalam bidangnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif,

meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Begitu juga sebaliknya, unsur sistem pengendalian intern sangat kuat jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

2.6 DEFINISI HUTANG

Akuntansi mendefinisikan hutang sebagai kemungkinan pengorbanan sumber ekonomis yang timbul dari transaksi atau kejadian atau kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. Utang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu :

- a. Hutang merupakan kewajiban saat ini yang mungkin akan dilunasi dengan mentransfer sumber ekonomi (aktiva) dimasa mendatang,
- b. Merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari, dan
- c. Transaksi menyebabkan timbulnya hutang telah terjadi.

Utang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, utang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek, jika diharapkan dapat dilunasi atau jatuh tempo dalam satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung jangka waktu yang lebih panjang.

Secara teoritis utang jangka pendek harus diukur sebesar nilai tunai (present value) jumlah pengeluaran-pengeluaran di masa mendatang yang

dibutuhkan untuk melunasi utang tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya utang jangka pendek biasanya dilaporkan sebesar nilai jatuh temponya.

Dalam pengertian utang jangka pendek ini, Munawir (1999 : 18) :

“Mengatakan bahwa utang lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.”